

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Effendie, Bachtiar. 1993. *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*. Alumni, Bandung.
- Emirzon, Joni. 2000. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrasi)*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan Pelaksanaannya Jilid I Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta.
- Haryana, A.M. 1991. *Sengketa di Tempat Kerja*. Kanisius, Yogyakarta.
- Loqman, Loebby. 1995. *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Penanggulangan dan Penyelesaian Sertipikat Bermasalah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Jakarta.
- Lubis, Mhd. Yamin dan Abd. Rahim. 2008. *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Jakarta.
- Murad, Rusmadi. 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Hak Atas Tanah*. Alumni, Bandung.
- Nasikun, 2003. *Sistem Sosial Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Poerwodigdo, Judo. 1999. *Strategi Pemberdayaan Untuk Rekonsiliasi Sebagai Alternatif Dalam Masyarakat*. Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria S.W, 2001. *Kebijakan Antara Regulasi dan Implementasi*. Kompas, Jakarta.
- Supranowo, 1992. *Sertipikat dan Permasalahannya*, Yogyakarta.

Jurnal

- Iswantoro, "Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Penguasaan Kepemilikan Tanah Adat", *Justitia Et Pax*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Edisi Khusus, Desember, 2006.
- Kuswanto Kus, Akhmad Khisni, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Kasus Tumpang Tindih Kepemilikan Atas Sebidang Tanah Di Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Kudus",

International Journal, Faculty of Law Sultan Agung Islamic University, Indonesia, Vol. 4, May, 2017.

Lia Malini Sari, Lathifah Hanim, “*Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Timbulnya Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik (SHM) Atas Tanah (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan/Agraria Dan Tata Ruang Kota Pontianak)*”, International Journal, Faculty of Law Sultan Agung Islamic University, Indonesia, Vol. 4, May, 2017.

Pinuji, Sukmo, “*Integrasi Sistem Informasi Pertanahan dan Infrastruktur Data Spasial Dalam Rangka Perwujudan One Map Policy*”, *Bhumi*, Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Edisi Khusus, Mei, 2016.

Purbowo, R, “*Peranan Badan Pertanahan Nasional Dalam Mencegah Terbitnya Sertipikat Asli Atau Palsu (ASPAL) Terhadap Hak Milik Atas Tanah*”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Edisi Khusus, Desember, 2002.

Sarjita, “*Strategi Mengelola Konflik Pertanahan*”, *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Edisi Khusus, Oktober, 2004.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1997 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746).

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Internet

www.bpn.go.id, Diakses pada tanggal 5 September 2017, pukul. 10.12 Waktu Indonesia Barat (WIB).